ABSTRAK

Penelitian berjudul "Pembiayaan Ekonomi Kreatif dengan Jaminan Kekayaan Intelektual Perspektif *Maqashid Syari'ah Fil Amwal* (Studi Persepsi MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung)" ditulis oleh Nujumul Qoyyumi, NIM. 1880502220004, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. dan Dr. H. M. Darin Arif Mu'alliffin. S.H., M.Hum

Kata Kunci: Jaminan, Kekayaan Intelektual, *Maqashid Syari'ah*, Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan ekonomi kreatif dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang menggunakan Kekayaan Intelektual atau disebut dengan KI sebagai jaminannya. Pembiayaan ini terbilang unik karena menggunakan jaminan benda tidak berwujud. Terdapat beberapa persoalan yang cukup menarik menjadi bahan kajian, seperti penilaian (valuasi) aset KI yang berbeda dengan aset berwujud lainnya serta fluktuasi nilai KI yang dapat berubah fluktuatif berdasarkan tren pasaran. Namun disisi lain pembiayaan ini juga mempunyai nilai positif bagi perekonomian nasional. Dengan menggunakan persepsi para praktisi yang terlibat langsung dengan pembiayaan ini, yaitu MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan Bank BTN KCP Tulungagung peneliti mengkaji menggunakan *perspektif maqashid syariah fil amwal*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana persepsi pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung? 2) Bagaimana skema pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung? 3) Bagaimana analisis pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual perspektif *maqashid syariah fil amwal* Ibnu 'Asyur?.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primair dan sumber data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan/verifikasi data (*Conclusion drawing/verification*). Peneliti juga melakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan Bank BTN KCP Tulungagung mempersepsikan dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang harus diatasi, karenanya pembiayaan ini masih belum berjalan secara komprehensif. Penggunaan KI sebagai aset tidak berwujud yang dijadikan jaminan membutuhkan kehati-hatian serta kesiapan secara menyeluruh.

Pembiayaan ini masih membutuhkan kesiapan seluruh aspek seperti operasionalisasi pelaksanaan, penilaian, manajemen dan legal. Karenanya pembiayaan ini masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan. Namun di lain sisi MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung memiliki persepsi positif yang sama mengenai keberlangsungan pembiayaan ekonomi kreatif akan memiliki potensi dan peluang di masa mendatang. Karena era perkembangan dan teknologi juga akan terus berkembang. Pembiayaan dengan jaminan KI akan memberikan manfaat kepada para pelaku kreatif, lembaga keuangan, pemerintah dan secara tidak langsung akan turut membantu mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. 2) Skema pembiayaan ekonomi kreatif merupakan penyaluran dana dalam bentuk pinjam meminjam antara perbankan/lembaga pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif dengan jaminan KI. Dalam prosesnya, terdapat pihak penilai KI yang akan memberikan penilaian aset jaminan. Persyaratan pengajuan pembiayaan dengan jaminan KI ini adalah proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait keyaaan intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki surat pencatatan Kekayaan Intelektual. Upaya realisasi skema pembiayaan masih menemui kendala yang menjadi kesulitan dalam pelaksanaan. Hal ini berkaitan dengan karakterististik KI yang khusus, berbeda dengan aset berwujud. Operasionalisasi KI selain adanya regulasi dan standarisasi penilaian membutuhkan kesiapan seluruh ekosistemnya. Meski skema pembiayaan ekonomi kreatif masih menjadi pembiayaan yang memiliki resiko yang tinggi, namun para praktisi seperti MAPPI dan Bank BTN terus berprogres untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pemberlakuan skema pembiayaan ini agar dapat berjalan dengan baik dan aman. 3) Pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan KI merupakan wujud mengupayakan *maslahat* dan upaya MAPPI dan Bank BTN dalam melakukan kajian dan pengembangan sebelum operasionalilasi KI merupakan bentuk menghindari *mafsadat*. Keduanya selaras dengan prinsip *maqashid syariah fil amwal* perspektif Ibnu ‘Asyur. Pembiayaan ini merupakan wujud pencapaian kemaslahatan dalam hal harta melalui pengembangan ekonomi kreatif, hal sesuai dengan lima prinsip *maqashid syariah fil amwal*, yaitu: *rawaju al-mal* (penyebaran harta), *wudhuhu al-amwal* (kejelasan harta), *hifdhu al-amwal* (perlindungan harta) *isbatu al-amwal* (kepastian harta) dan *al-‘adlu fi al-mal* (keadilan harta). Masih adanya kesulitan yang menjadi *mafsadat* bukan berati pembiayaan ini tidak membawa *maslahat*, karena pelestarian dan perlindungan kekayaan dengan mengelola Kekayaan Intelektual secara bertanggung jawab dan dapat berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan serta berkeadilan dalam tujuan pembiayaan ini merupakan bagian dari tujuan *maqashid syariah fil amwal*.

ABSTRACT

The research with tittle "Creative Economy Financing with Intellectual Property Guarantee from the Perspective of Maqashid Syari'ah Fil Muamalah (Study on the Perception of MAPPI and Bank BTN KCP Tulungagung)" was written by Nujumul Qoyyumi, NIM. 1880502220004, Master of Islamic Economic Law Program, Postgraduate Program of Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University (UIN) Tulungagung, advisor by Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. and Dr. H. M. Darin Arif Mu'alliffin. S.H., M.Hum

Keywords: *Creative Economy Financing, Guarantee, Intellectual Property, Maqashid Syari'ah*

This research is motivated by the existence of creative economy financing in Government Regulation No. 24 of 2022 which uses Intellectual Property or referred to as KI as collateral. This financing is unique because it uses intangible collateral. There are several issues that are quite interesting to be studied, such as the assessment (valuation) of intellectual property assets that are different from other tangible assets and fluctuations in the value of intellectual property that can fluctuate based on market trends. However, on the other hand, this financing also has a positive value for the national economy. By using the perceptions of practitioners who are directly involved in this financing, namely MAPPI (Indonesian Professional Appraisers Society) and Bank BTN KCP Tulungagung, the researcher will study it using the perspective of maqashid sharia fil muamalah.

The formulation of the problem in this study, namely: 1) What is the perception of creative economy financing with Intellectual Property guarantees according to MAPPI and Bank BTN KCP Tulungagung? 2) What is the creative economy financing scheme with Intellectual Property guarantees according to MAPPI and Bank BTN KCP Tulungagung? 3) How is the analysis of creative economy financing with Intellectual Property guarantees from the perspective of maqashid sharia fil amwal Ibn 'Asyur?.

The research method in this thesis used field research with a qualitative approach. The data sources of this study consist of primary data sources and secondary data sources. The data were obtained through in-depth interviews and documentation. The data analysis technique of this study uses Data condensation, Data display and Conclusion drawing/verification. The researcher will also check the validity of the data through triangulation techniques.

The results of this research indicate that: 1) MAPPI (Indonesian Society of Appraisers) and Bank BTN KCP Tulungagung perceive that there are still challenges to be addressed in the implementation of this financing, thus it has not yet been carried out comprehensively. The use of intellectual property (IP) as an intangible asset for collateral requires caution and thorough preparation. This financing still requires readiness in all aspects such as operational implementation, valuation, management, and legal frameworks. Therefore, this financing is still in the adjustment and development stages. On the other hand, both MAPPI and Bank BTN KCP

Tulungagung share a positive perception regarding the sustainability of creative economy financing, believing that it has potential and opportunities in the future, especially as the era of technological advancement continues to evolve. Financing secured by IP will benefit creative actors, financial institutions, the government, and indirectly contribute to the development and growth of the national economy. 2) The creative economy financing scheme involves providing funds in the form of loans by banks or financial institutions to creative economy players with IP as collateral. In the process, an IP appraiser assesses the value of the collateralized asset. The requirements for applying for financing with IP collateral include a financing proposal, a creative economy business, a contractual agreement related to the intellectual property of creative economy products, and an Intellectual Property registration certificate. Efforts to implement this financing scheme still encounter challenges in its execution. This is related to the unique characteristics of IP, which differ from tangible assets. The operationalization of IP requires, in addition to regulations and valuation standards, the readiness of the entire ecosystem. Although the creative economy financing scheme is considered high-risk, practitioners such as MAPPI and Bank BTN continue to make progress in addressing the various issues in the implementation of this financing scheme to ensure it runs safely and effectively.3) Creative economy financing with IP collateral represents an effort to achieve public benefits and is part of MAPPI's and Bank BTN's research and development efforts. Conducting studies and development before the operationalization of IP reflects an effort to avoid harm (mafsadat). These align with the principles of *maqashid shariah fil amwal* from the perspective of Ibn 'Ashur. This financing represents the achievement of benefits in wealth management through the development of the creative economy, in line with the five principles of *maqashid shariah fil amwal*, namely: *rawaju al-mal* (distribution of wealth), *wudhuhu al-amwal* (clarity of wealth), *hifdhu al-amwal* (protection of wealth), *isbatu al-amwal* (certainty of wealth), and *al-adlu fi al-mal* (justice in wealth). The existence of difficulties that lead to harm does not mean this financing does not bring benefits. Preserving and protecting wealth through the responsible management of Intellectual Property can contribute to sustainable and equitable national economic development, which aligns with the goals of *maqashid shariah fil amwal*.

الملخص

البحث بعنوان "تمويل الاقتصاد الإبداعي مع ضمانات الملكية الفكرية من منظور مقاصد الشريعة في المعاملات (دراسة عن التصورات العامة لمهنة التقييم الإندونيسية وبنك التوفير الحكومي تولونج أجونج)" من تأليف نجوم قيوم، ١٨٨٠٥٠٢٢٢٠٠٠٤، برنامج الماجستير قسم حكم الإقتصادية الشريعة كلية الشريعة وعلوم الحكم جامعة الإسلامية *الحكومية* تولونج أجونج. المشرفة: أ. الدكتورة عفّة نور الماجستيرة. و الدكتور دار عارف مألف الماجستير.

الكلمة الرئيسية: تمويل الاقتصاد الإبداعي، الضمان، الملكية الفكرية، *المقاصد الشرعية*.

مقاصد الشريعة

الدافع وراء هذا البحث هو وجود تمويل الاقتصاد الإبداعي في اللائحة الحكومية رقم. القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ الذي يستخدم الملكية الفكرية أو يشار إليه بالضمان. هذا التمويل فريد من نوعه لأنه يستخدم ضمانات للأشياء غير الملموسة. هناك العديد من القضايا المثيرة للاهتمام للغاية كمواد للدراسة، مثل تقييم (تقييم) الأصول التي تختلف عن الأصول الملموسة الأخرى وكذلك التقلبات في قيمة الملكية الفكرية التي يمكن أن تتقلب بناءً على اتجاهات السوق. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فإن هذا التمويل له أيضًا قيمة إيجابية للاقتصاد الوطني. ومن خلال استخدام تصورات الممارسين الذين يشاركون بشكل مباشر في هذا التمويل، وهم الجمعية المهنية للتقييم الإندونيسي وبنك التوفير الحكومي تولونج أجونج، سيقوم الباحثون بالدراسة باستخدام منظور مقاصد الشريعة في المعاملات.

وصياغة المشكلة في هذا البحث هي: ١) ما هو تصور تمويل الاقتصاد الإبداعي مع ضمانات الملكية الفكرية وفقا للجمعية المهنية للتقييم الإندونيسي وبنك التوفير الحكومي تولونج أجونج؟ ٢) ما هو مخطط تمويل الاقتصاد الإبداعي مع ضمانات الملكية الفكرية وفقًا للجمعية المهنية للتقييم الإندونيسي وبنك التوفير الحكومي تولونجاجونج؟ ٣) ما هو تحليل تمويل الاقتصاد الإبداعي مع ضمانات الملكية الفكرية من وجهة نظر ابن عاشور في مقاصد الشريعة في المعاملات؟

يستخدم أسلوب البحث في هذه الأطروحة البحث الميداني مع النهج النوعي. تتكون مصادر البيانات لهذا البحث من مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم الحصول على هذه البيانات من خلال المقابلات والوثائق المتعمقة. تستخدم تقنية تحليل البيانات في هذا البحث تكثيف البيانات وعرض البيانات واستخلاص/التحقق من الاستنتاج. سيقوم الباحثون أيضًا بالتحقق من صحة البيانات من خلال تقنيات التثليث.

وتشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: ١) يرى كل من الجمعية المهنية للتقييم الإندونيسي وبنك التوفير الحكومي فرع تولونج أجونج أن هناك تحديات تواجه تنفيذ هذا النوع من التمويل، وبالتالي فإن هذا التمويل لم يتم تطبيقه بشكل شامل بعد. إن استخدام الملكية الفكرية كأصل غير مادي لضمان القروض يتطلب الحذر والاستعداد الشامل. لا يزال هذا التمويل بحاجة إلى استعداد جميع الجوانب مثل تشغيل التنفيذ، التقييم، الإدارة، والجوانب القانونية. لذلك، لا يزال هذا التمويل في مرحلة التكيف والتطوير. ومع ذلك، فإن كل من الجمعية المهنية للتقييم الإندونيسي وبنك التوفير

الحكومي فرع تولونج أجونجيتفقان على رؤية إيجابية بشأن استدامة تمويل الاقتصاد الإبداعي، معتبرين أنه يمتلك إمكانيات وفرصًا في المستقبل، خاصة مع التطور المستمر للعصر والتكنولوجيا. تمويل الملكية الفكرية كضمان سيحقق فوائد للعاملين في المجال الإبداعي، والمؤسسات المالية، والحكومة، وسيسهم بشكل غير مباشر في تطوير وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. ٢) إن نموذج تمويل الاقتصاد الإبداعي هو عملية تقديم الأموال في شكل قروض بين البنوك/المؤسسات المالية والمبدعين مع ضمان الملكية الفكرية. في هذه العملية، يقوم خبراء تقييم الملكية الفكرية بتقييم الأصول المضمونة. متطلبات تقديم طلبات التمويل بضمان الملكية الفكرية تشمل: اقتراح تمويل، وجود نشاط في مجال الاقتصاد الإبداعي، وجود ارتباطات تتعلق بالملكية الفكرية للمنتجات الإبداعية، وشهادة تسجيل الملكية الفكرية. ومع ذلك، تواجه الجهود المبذولة لتحقيق هذا النموذج من التمويل بعض العقبات التي تعرقل تنفيذه، نظرًا للطبيعة الفريدة للملكية الفكرية التي تختلف عن الأصول المادية. إن تشغيل الملكية الفكرية يحتاج، بالإضافة إلى التنظيم ووضع معايير التقييم، إلى استعداد كامل للنظام البيئي. على الرغم من أن نموذج تمويل الاقتصاد الإبداعي يعتبر تمويلاً عالي المخاطر، إلا أن المتخصصين مثل الجمعية المهنية للتقييم الإندونيسي وبنك التوفير الحكومي في تولونجاجونج مستمرون في معالجة المشاكل المختلفة لتحقيق تنفيذ آمن وسليم لهذا النموذج التمويلي. ٣) يعتبر تمويل الاقتصاد الإبداعي بضمان الملكية الفكرية جهداً لتحقيق المنفعة العامة، وهو جزء من دراسات وتطوير الجمعية المهنية للتقييم الإندونيسي وبنك التوفير الحكومي فرع تولونج أغونج، حيث أن التشغيل المسؤول للملكية الفكرية هو وسيلة لتجنب الضرر. وهذا يتماشى مع مبادئ مقاصد الشريعة في الأموال من منظور ابن عاشور. هذا التمويل هو جزء من تحقيق المنفعة في الأموال من خلال تطوير الاقتصاد الإبداعي، بما يتوافق مع المبادئ الخمسة لمقاصد الشريعة في الأموال، وهي: رواج المال، وضوح الأموال، حفظ الأموال، اثبات الأموال ، والعدل في الأموال. إن وجود صعوبات تُعتبر مفسدة لا يعني أن هذا التمويل لا يجلب المنفعة، لأن الحفاظ على الملكية وحمايتها من خلال الإدارة المسؤولة للملكية الفكرية يمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة والعادلة، وهو جزء من أهداف مقاصد الشريعة في الأموال.